

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN MELALUI PROGRAM
HUTAN KEMASYARAKATN DI DESA MATTIROTASI
KECAMATAN WATTANG PULU
KABUPATEN SIDRAP**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sosiologi

Oleh :

Louise Angeline Pakasi

4516022002

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bosowa Makassar

2020

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Louise Angeline Pakasi

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Bosowa

Program Studi : Ilmu Sosiologi

Judul Skripsi : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN
MELALUI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN
DI DESA MATTIROTASI KECAMATAN WATTANG
PULU KABUPATEN SIDRAP

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga

Makassar, 31 Juli 2020

Penulis,



Louise Angeline Pakasi

4516022002

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Jum'at, Tanggal Enam Maret Dua Ribu Dua Puluh, Dengan Judul Skripsi

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN MELALUI PROGRAM HUTAN
KEMASYARAKATAN**

Nama : Louise Angeline Pakasi

No. Stambuk : 4516022002

Program Studi : Ilmu Sosiologi

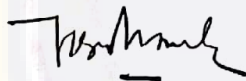
Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Sosiologi.

Mengetahui;

DEKAN FISIP Universitas Bosowa

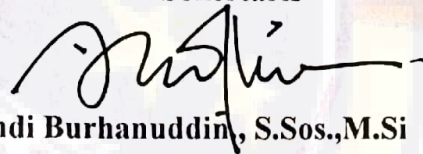

Arief Wicaksono, S. Ip., M. A

Ketua



Prof. Dr. H. Husain Hamka., M.S

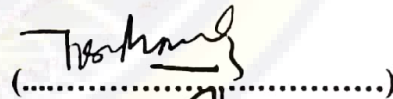
Sekretaris



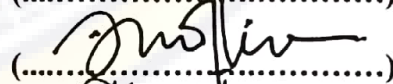
Andi Burhanuddin, S.Sos.,M.Si

Tim Penguji Skripsi

1. Prof. Dr. H. Husain Hamka., M.S


(.....)

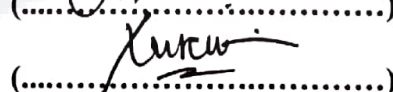
2. Andi Burhanuddin., S.Sos.,M.Si


(.....)

3. Dr. Hj. Asmirah, M.Si


(.....)

4. Dr. Hj. Nurmi Nonci, M.Si


(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

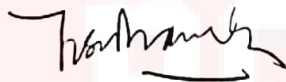
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN MELALUI PROGRAM
HUTAN KEMASYARAKATAN**

Louise Angeline Pakasi
4516022002

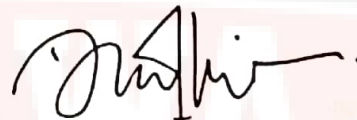
Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Husain Hamka.,M.S
NIDN. 0005115401




A. Burchanuddin, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0919047901

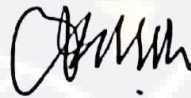
Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar




Arief Wicaksono, SIP,MA
NIDN. 0927117602

Ketua Jurusan
Ilmu Sosiologi



Dr. Hj. Asmirah, M.Si
NIDN. 0001076404

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Rahmat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang karena atas berkat dan kasih-Nya lah penulis dimampukan menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pemberdayaan Masyarakat Hutan Melalui Program Hutan Kemasyarakatan” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada program studi ilmu sosiologi.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis meminta maaf bila ada kekurangan serta dukungan melalui kritik dan saran yang dapat penulis gunakan dikemudian hari.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk seluruh orangtua yang mensupport , mencintai , menyayangi anak-anaknya dalam mewujudkan cita-cita. Untuk anak-anak yang sedari kecil tidak merasakan kasih sayang seutuhnya dari orangtuanya. Kalian tidak sendirian dan kalian bisa menjalani kehidupan ini atas ijin Tuhan, *so live as much and as full as you want spread your wings but you have to learn to fell first before you learn to fly.*

Terimakasih untuk Oma Agnes Margareth Maitimo yang selalu mengajarkan bahwa kasih adalah kunci kehidupan, belajar mengasih maka kamu akan mengampuni, terimakasih sudah sabar menjaga,merawat dan mendoakan terimakasih selalu menjadi sosok ibu yang luarbiasa bagi penulis. Untuk kedua orangtua penulis Alexander Pakasi dan Femi Hertanti atas pelajaran kehidupan yang kalian berikan, semesta menyertai. Untuk kakak Jesica Stevanie terimakasih

sudah menjadi role model sedari kecil, menjadi sumber motivasi saat belajar.

Untuk adik Agnetha Syalomitha tumbuhlah bebas dan mencintai kehidupanmu.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M. Eng sebagai Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Arief Wicaksono , S.Ip., MA sebagai Dekan FISIP Universitas Bosowa.
3. Ibu Dr. Asmirah, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Bosowa.
4. Bapak Prof. Dr. Hussain Hamka , M.Si dan A. Burchannuddin, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar dalam membimbing penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Nurmi Nonci, M.Si dan Ibu Dr. Asmirah selaku Penguji yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis.
6. Para Dosen yang sedari semester awal sampai akhir telah memberikan ilmu dan staf tata usaha FISIP (terkhusus Bu Mega dan Kak Budi)
7. Bapak Jumarlin dan Pak Amin dari Kelompok Tani HKm serta Pemerintah Desa Mattirotasi terimakasih atas informasi dan keramahan selama meneliti.
8. Sahabat Jiwa LDRSquad Claudia , Sika , Gema , Fey, Ravi , Garth terimakasih sudah menjadi one call away dan penghibur dikala penat. Dan motivator handal saat bertemu, torang samua basudara.

9. Anak- anak 9th Floor Entertainment terimakasih karena sudah mengajarkan kebersamaan diawal masuk jadi MABA , susah senang sama-sama. Kalian sudah yang ajarkan angel arti kesabaran dan keibuan.
10. Untuk Hairul, Frika, Aite, Patrick, Ondrey makasih sudah membagikan berbagai ilmu, waktu dan tidak pernah habis bahan untuk diskusi berbagai hal mulai dari yang masuk akal sampai tidak masuk akal.
11. Untuk Petta Hasan, Ayah Mukhlis, Ayah Rahmadi, Pak Aji. Makasih atas kebaikan selama dikampus selama masih sering di LPPM Maam Imma , Maam Farida, Maam Fivi teman makan selama disana. Maam Marini dosen tergaulku , teman curhat dan inspirasi ku untuk berbenah diri jadi lebih baik iloveyou to the moon and back.
12. Untuk teman-teman kantor Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi khususnya Kak Wulansari Mansyur yang membantu memberikan saran dan peluang untuk bertemu dengan kelompok tani.
13. Untuk Rini Paganggi, Sitti Nur Aqzrya Damaiyanti, makasih menjadi teman yang sangat supportif dari awal semester sampai akhirnya kita lulus sama-sama. Makasih selalu kasih motivasi ketika pikiran mentok dan gak berarah apalagi ketika terlalu fokus kerja dan lupa sama tugas kuliah. Monica Ayu yang sudah hampir sama kayak pembimbing skripsi, makasih sudah sabar dan kuat menemani angel.
14. *Last but not least to* Orlando Valentin Panjaitan yang tidak kalah mensupport , menemani selama wawancara selama kelapangan dan selama

penyusunan skripsi yang sabar saat angel mulai panik dan berusaha menenangkan terimakasih. Semoga Tuhan Memberkati.

Penulis

Louise Angeline Pakasi

UNIVERSITAS

BOSOWA

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal yang sifatnya penting untuk bisa dilakukan di setiap wilayah dan memiliki cakupan yang luas tidak terkecuali untuk wilayah perhutanan. Pada penelitian ini, peneliti meneliti terkait pemberdayaan Masyarakat hutan dengan melalui suatu program yang bernama Program Hutan Kemasyarakatan, tepatnya di Desa Mattirotasi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemberdayaan masyarakat Hutan di Desa Mattirotasi melalui program HKM. Hal ini kemudian berkaitan dengan mekanisme yang digunakan, proses hingga faktor-faktor yang ada dilapangan yang memberikan pengaruh bagi pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menekankan pada penggunaan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini peneliti harus menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Pada hasil penelitian bahwa nyatanya selama ini mekanisme dari pemberdayaan masyarakat belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan masih biasanya ditemukan ketidaksesuain antara sosialisasi dan implementasi. Namun pada usaha memberdayakan masyarakat dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini kemudian tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Desa Mattirotasi yaitu mulai dari faktor eksternal dan internal. Maka sangat penting namanya konsistensi dalam melakukan atau menerapkan suatu program. Hal ini dapat dilakukan dari sebuah tindakan pengontrolan dengan seperti pembuatan tim untuk melihat perkembangan masyarakat di Desa Mattirotasi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap

Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Hutan kemasyarakatan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENERIMAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPRIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemberdayaan Masyarakat	5
B. Hutan Kemasyarakatan	11
C. Kesejahteraan	14
D. Kerangka Konseptual.....	17
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22

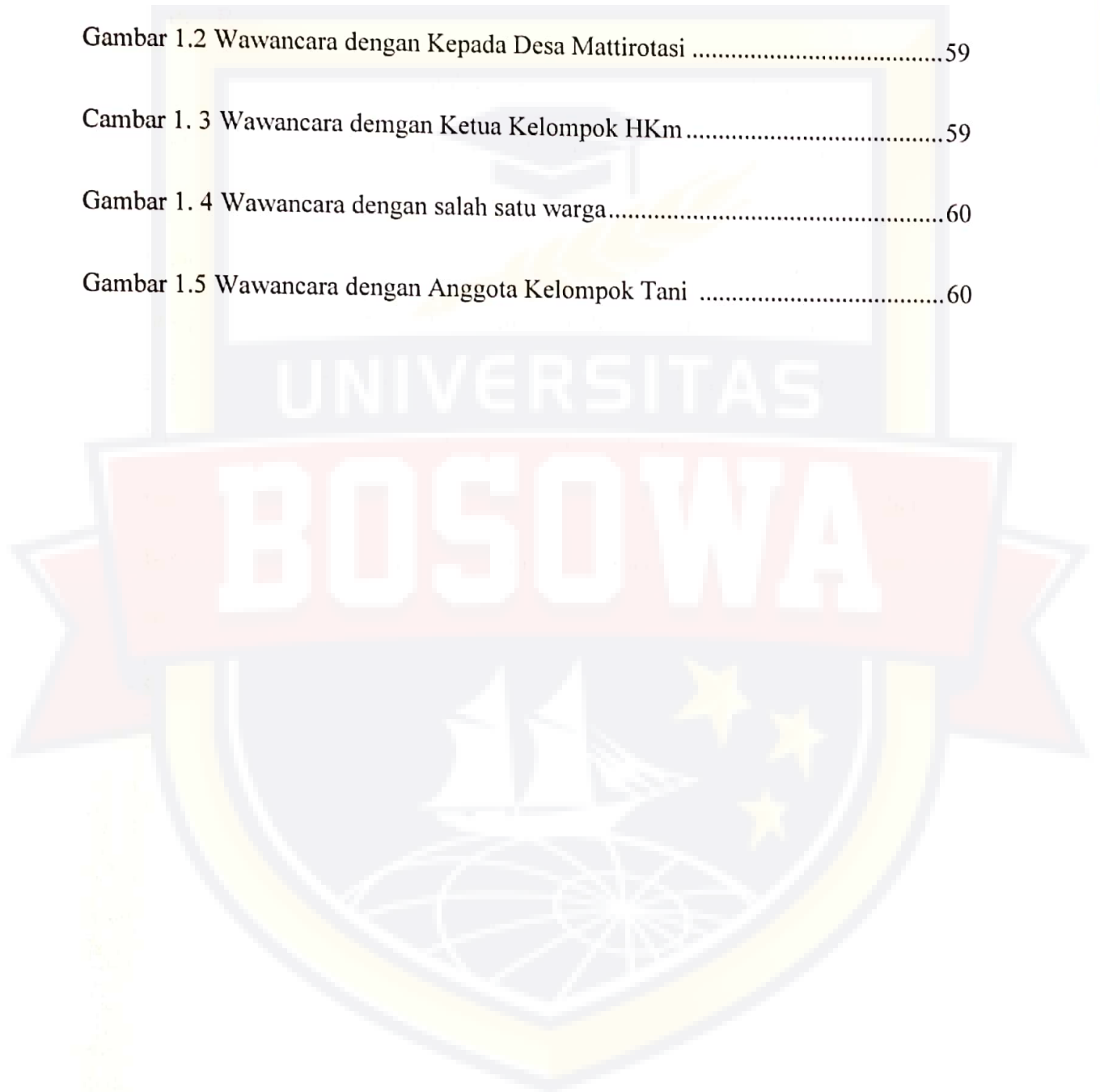
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Fokus dan Sumber Data	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Mattirotasi	29
B. Letak Geografis Desa Mattirotasi	31
C. Keadaan Penduduk Desa Mattirotasi	31
D. Keadaan Sosial Desa Mattirotasi	33
E. Keadaan Ekonomi Desa Mattirotasi.....	33
F. Sarana dan Prasarana Desa Mattirotasi.....	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Informan.....	36
B. Hasil Penelitian	37
C. Pembahasan Penelitian.....	38
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Mattirotasi	30
Tabel 2. Waktu Tempuh dan Letak Desa.....	30
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	31
Tabel 4. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Mattirotasi	32
Tabel 5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Mattirotasi	32
Tabel 6. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Mattirotasi	33
Tabel 7. Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	34
Tabel 8. Sarana dan prasarana di Desa Mattirotasi.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1 Wawancara dengan Ibu N (anggota kelompok Tani HKm)	59
Gambar 1.2 Wawancara dengan Kepala Desa Mattirotasi	59
Gambar 1.3 Wawancara dengan Ketua Kelompok HKm	59
Gambar 1.4 Wawancara dengan salah satu warga	60
Gambar 1.5 Wawancara dengan Anggota Kelompok Tani	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah salah satu konsern dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang bermukim dekat kawasan hutan, masyarakat hutan yang identik dengan perekonomian dan pendidikan yang rendah menjadikan masyarakat hutan terkesan kurang kreatif dalam mencari sumber mata pencaharian sehingga masyarakat sangat menggantungkan hidup pada areal kawasan hutan namun dengan cara yang tidak ramah lingkungan atau menjadi buruh tanam , buruh petik atau buruh pabrik pada daerahnya bermukim. Tingkat pengetahuan masyarakat akan kegiatan ramah lingkungan tersebut membuat masyarakat mengelola kawasan hutan dengan cara yang tidak baik seperti ladang berpindah, penebangan pohon kayu di hutan secara massive tanpa melakukan reboisasi kembali sehingga dibutuhkan sebuah win-win solution untuk masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Perhutanan Sosial adalah Program yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Periode 2015-2019 yang salah satunya adalah Skema HKm. Menurut Suharto dalam Anwas (2014:87) pendekatan penerapan pemberdayaan dapat dilakukan dengan 5 P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan , penyokongan dan pemeliharaan. Dari salah satu pendekatan penerapan pemberdayaan tersebut aspek penguatan memiliki arti yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam

memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya maka dari itu pemberdayaan dapat mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Solusi yang ditawarkan pemerintah agar masyarakat bisa mandiri dari segi ekonomi dan mengelola sendiri Hasil Hutan Bukan Kayu serta melakukan penghijauan kembali untuk hutan, masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan jadi lebih leluasa mengembangkan usaha HHBK tadi tanpa perlu khawatir masuk ke dalam hutan secara ilegal namun bagaimana mengelola hutan yang dari segi ekonomis namun lestari, dalam hal ini masyarakat lebih di kenalkan berbagai variasi usaha dan pasar untuk bisa mengembangkan usahanya. Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar memiliki taraf hidup yang lebih baik. Pemberdayaan menekankan bahwa orang mendapat keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mengubah kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons 2014 : 49).

Di Sulawesi Selatan sendiri salah satu Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan yang tengah berkembang adalah Kelompok Tani Hutan Sipatuo II salah satu kelompok perhutanan sosial yang ada di Desa Mattirotasi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap, HKm ini terbentuk pada tahun 2012, Izin HKm pada saat itu masih dikeluarkan oleh Bupati Sirenreng Rappang dengan Nomor Izin PS 337 Tahun 2012 dengan luas areal kelola 49,25 Ha. Sebelum masuknya program HKm di Desa Mattirotasi masyarakat banyak mengelolah lahan disekitar rumahnya

dengan menanam sayuran dan tanaman palawija seperti jagung dan mete lalu dijual ke pasar tanpa dikelola lebih lanjut selain itu kebanyakan masyarakat lainnya menjadi buruh pabrik. Pola pikir masyarakat yang staknan , situasi tanah sarana dan prasarana desa yang minim menghambat masyarakat untuk mengembangkan diri dengan program ini namun semakin berkembangnya program dan penyempurnaan aturan membuat program HKm di desa ini dapat berkembang dengan sendirinya bukan hanya programnya namun masyarakat semakin melihat peluang usaha dari lingkungan hutan sekitar mereka. Dalam hal ini IUPHKm KTH Sipatuo II tengah mengembangkan salah satu produk mereka, masyarakat telah melakukan budidayaJambu Mete mulai dari penanaman sampai dengan pemasaran hasil berupa Kacang Mete Chrispy , Kacang Mete Sangrai dan yang terbaru Kacang Kurma Mete.Diduga dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program HKM ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan dan diharapkan sejalan dengan tujuan Program Perhutanan Sosial dimana masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk mengambil sebuah penelitian **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN MELALUI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat penerima manfaat dalam program HKm?
2. Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang diterapkan melalui program HKM?
3. Faktor apakah yang mempengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program HKm?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme yang digunakan dalam keterlibatan masyarakat penerima IUPHKm
2. Untuk mengetahui skema program HKm yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program HKm ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan kepada masyarakat luasterkait Program Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
2. Memberikan referensidan informasi untuk penelitan lebih lanjut terkait Program Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa .

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengatakan bahwa:

“pemberdayaan masyarakat merupakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui ketetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.”

Secara Konseptual, Pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan) karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan pemberian kekuasaan , kekuasaan yang sering dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat oranglain melakukan apa yang kita inginkan terlepas dari keinginan dan niat mereka.

Secara etimologis, Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya, Menurut Suhendra (2006 : 74-75) adalah:

“Suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.

Selanjutnya pemberdayaan menurut Ife (dalam Suhendra 2006 : 77) adalah:

“meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (empowerments aims to increase the power of disadvantage).

Lalu menurut Adisasmita (2006:35) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien seperti:

1. Aspek Masukan atau Input (Sumber Daya Manusia, Dana, Peralatan atau Sarana, Data , Rencana , Teknologi)
2. Aspek proses (Pelaksanaan, Monitoring, dan Pengawasan)
3. Aspek Keluaran atau Output (Pencapaian Sasaran, Efektivitas, dan Efisiensi)

Menurut Sumaryadi (2005:1) pemberdayaan masyarakat adalah:

“upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian , dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”.

Selain itu pemberdayaan menurut Sumaryadi berdasarkan 2 (dua) hal berikut :

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah , rentan, miskin, perkantoran, masyarakat adat, yang keterbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan.
2. Memperdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara social ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat\.. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketebelakangan. Sedangkan menurut Prijono dan Pranaka (1996:105-106) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu :
 - a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi Masyarakat untuk berkembang kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian setiap individu perlu di perdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu yang kemudia

meluas ke keluarga serta kelompok masyarakat baik di tingkat local maupun nasional.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun social (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat masyarakat semakin berdaya seperti sedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran dipedesaan ,dalam upaya memberdayakan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi informasi, lapangan kerja dan pasar.
- c. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah . dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu , perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat . melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasu atas yang lemah.

Pengembangan atau pemberdayaan masyarakat sejatinya merupakan proses. Dalam mengevaluasi proyek pengembangan masyarakat siapa pun harus melihat proses, dan dalam merencanakan serta menerapkan program pengembangan masyarakat apapun senantiasa merupakan proses bukan hasil yang harus dipertimbangkan mendalam. Orang-orang yang menekankan pada pernyataan hasil perlu menyadari bahwa untuk pengembangan masyarakat proses yang baik merupakan hasil terpenting yang dapat dicapai. Proses yang baik akan mendorong masyarakat untuk menentukan tujuan mereka sendiri dan tetap menguasai perjalanan selain tujuan akhir. Pengembangan masyarakat perlu mengupayakan pembentukan cara berpikir yang menghargai saling interaksi di antara masyarakat, menghargai kualitas pengalaman kolektif, dan memaksimalkan potensi mereka dan mencapai pri kemanusiaan mereka secara utuh melalui pengalaman proses masyarakat.

Edi Suharto (2005: 67) mengemukakan pelaksanaan pencapaian tujuan pemberdayaan melalui lima pendekatan yaitu:

1. Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bisa menunjang kemandirian.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah dari adanya persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berupamengeksploitasi.

4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam keadaan yang merugikan.
5. Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan untuk menjamin setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif jika menampilkan lima karakteristik (Suharto: 71), yakni:

1. Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal adalah perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan sumber daya lokal, dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.
2. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat sekitar.
3. Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik, maksudnya mencakup semua aspek. Sumber daya lokal, seperti alam, budaya, tradisi, patut didayagunakan.
4. Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dalam hal ini misalnya membuka akses bagi masyarakat terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, dan manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

5. Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, yaitu suatu kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara terus menerus tidak berhenti pada suatu program yang telah terselesaikan saja tetapi terus berkesinambungan dengan program yang lain.

Dalam pengembangan masyarakat tidak hanya berfokus pada sosialnya, tetapi juga pada peningkatan ekonominya. *Ketiga*, pengembangan politik terdiri atas dua yaitu pengembangan politik internal dan eksternal. Pengembangan politik internal membahas mengenai peningkatan kesadaran dan pengorganisasian. Jadi, tataran perubahan itu masih dalam lingkup dalam masyarakat. Pengembangan politik eksternal terdiri dari pengorganisasian dan aksi sosial. Jadi, tataran perubahan yang terjadi dalam masyarakat melalui sebuah tindakan nyata untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi dalam pengembangan masyarakat itu sendiri.

B. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial pada Pasal 1 dan Ayat 3, Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan Kemasyarakatan dikenal dengan *Community Forestry*.

Hutan kemasyarakatan menurut keputusan menteri kehutanan RI nomor : 31 tahun 2000 adalah:

“hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.”

Dalam pelaksanaannya program hutan kemasyarakatan menurut Wardoyo (1997) terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami, diantaranya:

1. Perhutanan sosial diartikan sebagai pelibatan masyarakat dalam bentuk pemberian ijin penguasaan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam pembangunan kehutanan untuk merencanakan, mengusahakan, memelihara, mengendalikan dan mengawasi serta memanfaatkan hasil hutan (baik kayu maupun bukan kayu) dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya.
2. Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada masyarakat setempat melalui koperasinya untuk melakukan program hutan kemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu.
3. Peserta hutan kemasyarakatan adalah orang yang kehidupannya dari hutan atau kawasan hutan yang secara sukarela berperan aktif dalam kegiatan hutan kemasyarakatan.
4. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang membentuk komunitas yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejahteraan, keterikatan tempat tinggal, serta peraturan tata tertib kehidupan bersama.

5. Maksud dari pelaksanaan hutan kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan sehingga kelestarian sumberdaya hutan dapat dipertahankan (Dephutbun,1999).

Maksud dan Tujuan Hutan Pembangunan hutan kemasyarakatan, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan social masyarakat
2. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat pengusaha hutan
3. Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan
4. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan
5. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat
6. Mendorong serta mempercepat pembangunan wilayah

Ada tiga asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan :

1. Sektor Kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekitar hutan , yang hidupnya tergantung pada interaksi dengan hutan dan tanah hutan.

2. Sekitar kehutanan dan para rimbawan harus mengintegrasikan dengan sektor-sektor lain dan perlunya faktor-faktor luar sector kehutanan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan kehutanan.
3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

Hutan kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan kepentingan kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumber daya hutan dan kelestarian fungsi hutan merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam pengelolaan hutan. (Roslinda 2008: 5).

Tanggapan lingkungan hidup terhadap masalah-masalah ekologis memiliki dua ciri penting. *Pertama*, mereka berupaya memecahkan masalah-masalah spesifik dengan solusi-solusi yang diskrit. Jadi, masalah pemanasan global diatasi dengan mengurangi gas rumah kaca, masalah berkurangnya sumber daya dengan teknologi alternatif, masalah polusi dengan teknologi anti-polusi, masalah populasi dengan program keluarga berencana, masalah hilangnya alam liar dengan menciptakan kawasan lindung, masalah kepunahan jenis dengan program jenis langka dan seterusnya. *Kedua*, mencari solusi-solusi dalam orde sosial, ekonomi, dan politik yang ada saat ini.

Sebaliknya, tanggapan *green* terhadap masalah-masalah lingkungan hidup memakai pendekatan yang lebih mendasar atau radikal. Pendekatan

tersebut melihat masalah-masalah lingkungan hidup sebagai sekadar gejala-gejala dari masalah mendasar yang lebih penting. Itu adalah konsekuensi dari suatu orde sosial, ekonomi, dan politik yang secara mencolok tidak berkelanjutan, dan karena itu adalah orde sosial, ekonomi, dan politik inilah yang harus diubah. Jadi, inti dari tanggapan lingkungan dan tanggapan *green* adalah menanggapi krisis lingkungan hidup.

C. Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu.

Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan. Menurut Undang - Undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah:

“ kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Dari Undang - Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan.

Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

Seorang pekerja masyarakat yang ingin melakukan sebuah perubahan dari bawah harus memenuhi berbagai syarat yaitu menghargai pengetahuan lokal, menghargai kebudayaan lokal, menghargai keterampilan lokal, mampu bekerja dalam solidaritas yang tidak hanya mementingkan pengetahuan diri sendiri. Jika ingin melakukan sebuah perubahan dari bawah perlu pengetahuan awal mengenai landasan ideologis dan teoretis sebagai dasar dalam melakukan perubahan tersebut. Beberapa landasan ideologis dan teoretis tersebut adalah pluralisme, sosialisme demokratis, anarkhisme, post-kolonialisme, post-modernisme, dan feminisme.

Menurut Mosher (1987), hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera. Menurut konsep lain, kesejahteraan bisa di ukur melalui dimensi moneter maupun non moneter, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendapatan

penduduk di suatu daerah. Kemudian masalah kerentanan (*vulnerability*), yang merupakan suatu kondisi dimana peluang atau kondisi fisik suatu daerah yang membuat seseorang menjadi miskin atau menjadi lebih miskin pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat struktural dan mendasar yang mengakibatkan risiko-risiko sosial ekonomi dan akan sangat sulit untuk memulihkan diri (*recover*). Kerentanan merupakan suatu dimensi kunci dimana perilaku individu dalam melakukan investasi, pola produksi, strategi penanggulangan dan persepsi mereka akan berubah dalam mencapai kesejahteraan.

D. Kerangka Konseptual

Perhutanan Sosial diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 3 huruf d bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 23 diamanatkan bahwa hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui kegiatan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mendorong berbagai upaya pengelolaan hutan

dengan melibatkan masyarakat baik di kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara melalui Program Perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kelestarian hutan yang sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut antara lain dilakukan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA).

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial pada Pasal 1 dan Ayat 3, Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan Kemasyarakatan dikenal dengan *Community Forestry*.

Hutan kemasyarakatan menurut keputusan menteri kehutanan RI nomor : 31 tahun 2000 adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya

Dalam pelaksanaannya program hutan kemasyarakatan menurut Wardoyo (1997) terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami, diantaranya:

1. Perhutanan sosial diartikan sebagai pelibatan masyarakat dalam bentuk pemberian izin penguasaan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam pembangunan kehutanan untuk merencanakan, mengusahakan, memelihara, mengendalikan dan

mengawasi serta memanfaatkan hasil hutan (baik kayu maupun bukan kayu) dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya

2. Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada masyarakat setempat melalui koperasinya untuk melakukan program hutan kemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu
3. Peserta hutan kemasyarakatan adalah orang yang kehidupannya dari hutan atau kawasan hutan yang secara sukarela berperan aktif dalam kegiatan hutan kemasyarakatan
4. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang membentuk komunitas yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejahteraan, keterikatan tempat tinggal, serta peraturan tata tertib kehidupan bersama.
5. Maksud dari pelaksanaan hutan kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan sehingga kelestarian sumberdaya hutan dapat dipertahankan (Dephutbun, 1999)..

Pada umumnya pembangunan hutan kemasyarakatan memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

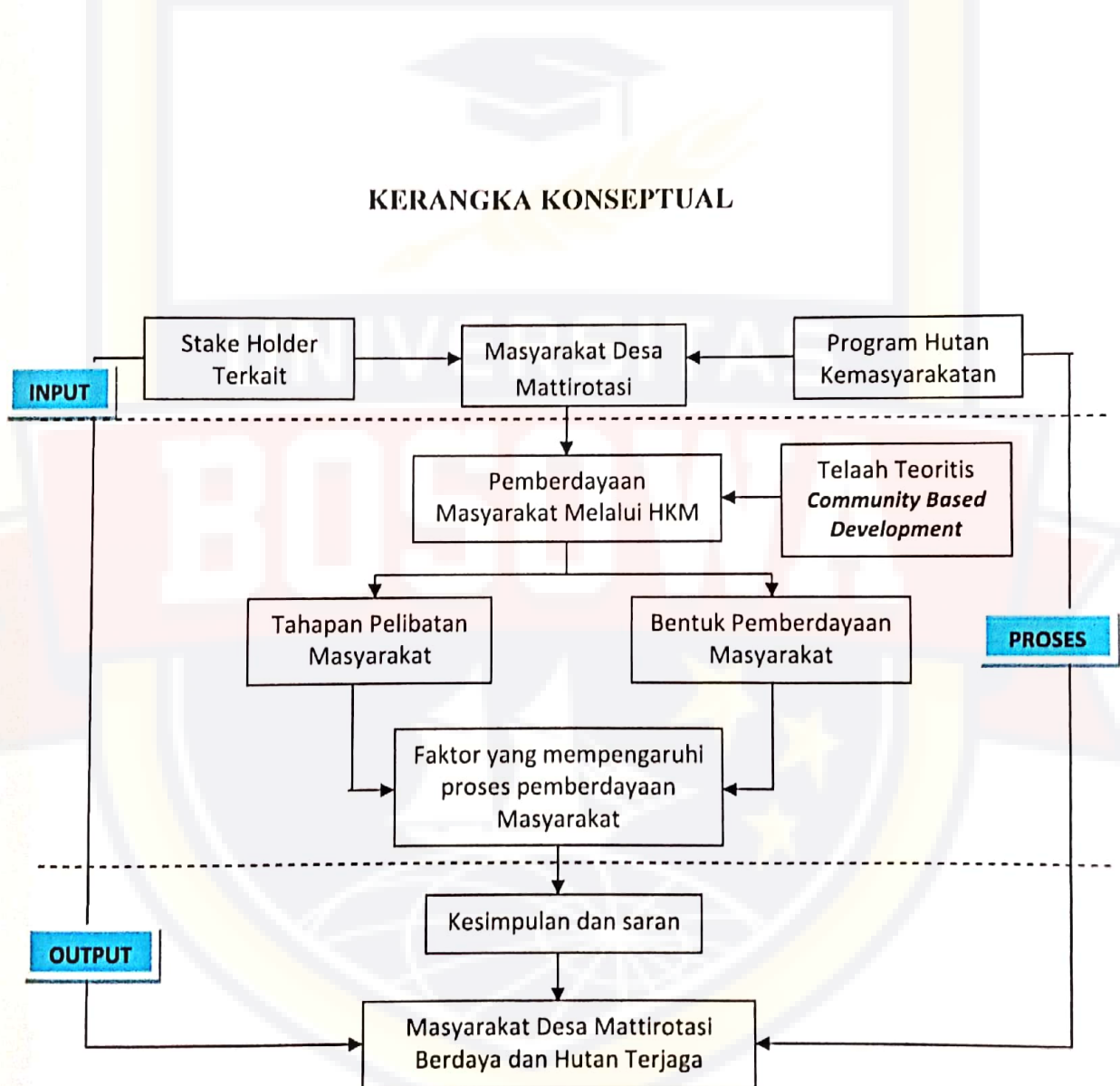
1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan social masyarakat
 2. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat pengusaha hutan
 3. Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan
 4. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan
 5. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat
 6. Mendorong serta mempercepat pembangunan wilayah
- Ada tiga asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan

kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan :

1. Sektor Kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekitar hutan , yang hidup nya tergantung pada interaksi dengan hutan dan tanah hutan.
2. Sekitar kehutanan dan para rimbawan harus mengintegrasikan dengan sektor-sektor lain dan perlunya faktor-faktor luar sector kehutanan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan kehutanan.
3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

Hutan kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan kepentingan kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumber daya hutan dan

kelestarian fungsi hutan merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam pengelolaan hutan. (Roslinda 2008:5). Berikut adalah skema kerangka konseptual sebagai dasar penyusunan hasil penelitian nantinya agar lebih mudah dipahami.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menekankan pada penggunaan data yang diperoleh dari lapangan. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konsep sosial (Sugiyono, 2005 : 213)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, sehingga tidak mungkin data yang pada situasi tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif seperti test, questioner. Selain itu penelitian dengan metode kualitatif digunakan oleh penulis untuk memahami secara baik situasi sosial, budaya dan perkembangan masyarakat pada Desa Mattirotasi Kab. Sidrap.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Alasan peneliti

menentukan lokasi tersebut dikarenakan Desa Mattirotasi telah mengembangkan program Hutan Kemasyarakatan cukup lama.

2. Rencana pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Desember - Januari 2019.

C. Fokus dan Sumber Data

1. Fokus data

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dalam melakukan penelitian maka peneliti mendeskripsikan focus kajian sehubungan dengan variable yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Masyarakat adalah sekumpulan atau sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.
- b. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.
- c. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya
- d. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup

layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya

- e. Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

2. Sumber Data.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner di sebarakan melalui internet. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industry oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma sekaran,2011). Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (sugiono:2008:402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku dan literatur .

D. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012:63) menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi)

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian, yang dalam hal ini Desa Mattirotasi, kecamatan Wattang Pulu, kabupaten Sidrap, dengan tujuan untuk melakukan pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diselidiki (sugiyono:2017:226).Metode ini dilakukan peneliti dengan mengamati

langsung di lapangan kondisi obyektif sasaran penelitian. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan secara langsung gambaran masalah yang diteliti dengan cara mengamati aktivitas dari masyarakat di Desa Mattirotasi dan mengamati kondisi sosialnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang masalah yang sedang diteliti, maka peneliti menggunakan observasi partisipan, di mana peneliti ikut serta dalam segala kegiatan dari masyarakat Mattirotasi yang berhubungan dengan upacara ada.

2. Wawancara

Wawancara atau yang biasa yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memastikan kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Sehingga didapatkan penjelasan secara langsung dan lebih akurat mengenai penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan mengajukan Tanya jawab secara langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik inipun dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut sugioyono (2012 : 82-83) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian, dokumentasi yang dimaksudkan penulis dalam hal ini adalah peninggalan tertulis dan mengambil gambar atau foto-foto dan hukum-hukum yang termasuk dalam masalah penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono (2012 : 89) analisi data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman (Sugiyono,2012 : 246) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, displaydata, dan verifikasi data.

1. Reduksi data

Menurut sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.

2. **Display Data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Miles dan Huberman (Sugiyono 2012 :95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. **Verifikasi data**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal , didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Mattirotasi

Alkisah ada tiga laki-laki berteman masuk disuatu perkampungan, ketiga laki-laki tersebut bernama Wa Icing , Wa Paggeta, dan Wa Becci. Salah satu dari mereka naik ke atas pohon dan mengamati sekelilingnya maka disitulah dia dapat memandang laut dengan jelas kemudian setelah turun dari pohon , maka ketiga orang tersebut melakukan musyawarah untuk memberikan nama pada perkampungan tersebut, karena dapat memandang laut dengan jelas disebutlah perkampungan tersebut Mattirotasi. Tahun 1994 Mattirotasi masih disebut dengan Desa Lamungan kemudian berubah menjadi desa Mattirotasi pada tahun 1995 setelah mengalami pemekaran.

Tahun 1984, Nohong B sebagai Kepala Desa pertama desa Lainungan (1984-1994) Desa Lainungan kemudian pada tahun 1995 di mekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu :

1. Desa Lainungan
2. Desa Mattirotasi

Kepala Desa Pertama setelah dimekarkan H. Ahmad Dani Periode 1995-2003. Selanjutnya digantikan oleh Dr. Zainuddin Makkarennu sebagai Kepala Desa kedua periode 2003-2008 yang terpilih secara langsung.

B. Letak Geografis Desa Mattirotasi.

Faktor geografis adalah faktor yang penting dan mempengaruhi kehidupan manusia. Pentingnya faktor ini terlihat pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan proses kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam menganalisis suatu masalah yang ada hubungannya dengan suatu daerah, maka obyek analisis tidak lepas dari usaha untuk mengetahui secara lengkap tentang lokasi dan pengembangan daerah tersebut.

Desa Mattirotasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah salah satu desa di wilayah kecamatan Wattang Pulu yang merupakan wilayah kerja pemerintah Kabupaten Sidrap.

Desa Mattirotasi memiliki suhu sekitar 26° - 30° C. Wilayah ini sangat mudah untuk dijangkau karena hanya berjarak sekitar 5 km dari ibu kota Kabupaten Sidrap.

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Mattirotasi.

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Kabupaten Pinrang	Wattang Pulu
Sebelah Selatan	Desa Buae	Wattang Pulu
Sebelah Barat	Kota Pare- pare	Wattang Pulu
Sebelah Timur	Desa Lenungan	Wattang Pulu

(sumber dari rancangan pembangunan jangka menengah Desa Mattirotasi tahun 2016-2021)

Tabel 2. Waktu Tempuh dan Letak Desa

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak Ke Ibukota Kecamatan	5 Km
2.	Jarak Ke Ibukota Kabupaten/Kotamadya	10 Km
3.	Jarak Ke Ibukota Propinsi	362 Km
4.	Waktu Tempuh ke Ibukota Kecamatan	30 Menit
5.	Waktu Tempuh ke Ibukota Kabupaten	1 Jam
6.	Waktu Tempuh ke Fasilitas terdekat (Ekonomi,Kesehatan,Pemerintahan)	30 Menit

(sumber dari rancangan pembangunan jangka menengah Desa Mattirotasi tahun 2019)

C. Keadaan penduduk Desa Mattirotasi

Desa Mattirotasi merupakan wilayah yang dihuni oleh mayoritas penduduk asli bahkan hampir semua warga Langda memiliki hubungan darah satu dengan yang lain. Jumlah penduduknya sekitar 2512 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sekitar 630 KK yang terdiri daari 1.033 laki-laki dan 1.479 Untuk lebih jelasnya, maka tabel di bawah ini akan menjelaskan keadaan penduduk Desa Mattirotasi:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	USIA PENDUDUK (TAHUN)	JUMLAH JIWA
1.	0 – 4	128
2.	5 – 9	146
3.	10 -14	129
4.	15 -19	100
5.	20 -24	107
6.	25 -29	176
7.	30 -34	144
8.	35-39	169

9.	40 – 44	129
10.	45 – 49	76
11.	50 – 54	62
12.	55 – 59	81
13.	60 -69	97
14.	70 +	105
J U M L A H		1.649

(sumber dari rancangan pembangunan jangka menengah Desa Mattirotasi tahun 2016-2021).

Tabel 4. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Mattirotasi

NO	LULUSAN SEKOLAH	JUMLAH JIWA
1.	Tidak Tamat SD	85
2.	SDN atau yang sederajat	324
3.	Madrasah Ibtidayah	-
4.	SLTP atau yang sederajat	132
5.	Madrasah Tsanawiyah	-
6.	SMU/SMK	151
7.	Madrasah Aliyah	-
8.	Akademi/Diploma	87
9.	Sarjana Perguruan Tinggi	29

(sumber dari rancangan pembangunan jangka menengah Desa Mattirotasi tahun 2019).

Tabel 5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Mattirotasi

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH JIWA
1.	Petani Pemilik Sawah	179
2.	Petani Penggarap	38
3.	Buruh Tani	695
4.	Karyawan Perusahaan/Pabrik	75
5.	Pedagang/Penjual Makanan/Warung/Kios	46
6.	Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan	87
7.	TNI/Polri/Purnawirawan	12
8.	Tukang/Buruh Bangunan	56
9.	Pengemudi angkutan umum (Mobil,Ojek)	28
10.	Wiraswasta/Wirausaha	4
11.	Lain-lain	-

(sumber dari rancangan pembangunan jangka menengah Desa Mattirotasi tahun 2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar warga Mattirotasi bekerja di bidang pertanian dengan diikuti dengan warga yang bekerja sebagai PNS/Pensiunan, TNI dan porli, tukang buruh bangunan, pengemudi angkutan umum dan sisanya tidak memiliki pekerjaan.

UNIVERSITAS

BOSOWA

D. Keadaan Sosial Desa Mattirotasi

Desa Mattirotasi berada dalam wilayah Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap dimana kehidupan bermasyarakatnya hidup dalam keadaan tertib dan damai dengan mengutamakan kehidupan yang saling menghargai dan toleransi antar umat beragama.

Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah dibuktikan dengan masih kurangnya masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan masih ada penduduk yang buta huruf. Untuk lebih jelasnya, maka tabel di bawah ini akan menjelaskan keadaan sosial Desa Mattirotasi:

Table 6. keadaan sosial masyarakat Desa Mattirotasi

NO	LULUSAN SEKOLAH	JUMLAH JIWA
1.	Tidak Tamat SD	85
2.	SDN atau yang sederajat	324
3.	Madrasah Ibtidayah	-
4.	SLTP atau yang sederajat	132
5.	Madrasah Tsanawiyah	-
6.	SMU/SMK	151
7.	Madrasah Aliyah	-
8.	Akademi/Diploma	87
9.	Sarjana Perguruan Tinggi	29

(sumber dari rancangan pembangunan jangka menengah Desa Mattirotasi tahun 2016-2021).

E. Keadaan Ekonomi Desa Mattirotasi

Tingkat perkembangan keadaan Ekonomi masyarakat masih belum berkembang. Walaupun sebagian besar wilayah Desa Mattirotasi adalah lahan pertanian dan perkebunan dengan mata pencaharian penduduk adalah petani dan peternak.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara bertani dan berkebun yang baik, selain sektor pertanian dan perkebunan Desa Mattirotasi juga sangat potensial untuk sektor Peternakan dan perikanan .

Tabel 7. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

a. Struktur Mata Pencaharian Penduduk

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH JIWA
1.	Petani Pemilik Sawah	179
2.	Petani Penggarap	38
3.	Buruh Tani	695

(sumber dari rancangan pembangunan jangka menengah Desa Mattirotasi tahun 2019).

b. Sektor Peternakan

NO	STATUS	JUMLAH (ORANG)
1.	Pemilik Ternak Sapi	25
2.	Pemilik Ternak Kerbau	-
3.	Pemilik Ternak Babi	-
4.	Pemilik Ternak Kuda	-
5.	Pemilik Ternak Kambing	10
6.	Pemilik Ternak Ayam	-
7.	Pemilik Ternak Itik	-
8.	Pemilik Ternak Burung	-
9.	Buruh/Pekerja Usaha Peternakan	-

(sumber data, RPJM Desa Mattirotasi tahun 2016-2021).

c. Sektor Industri Kecil/ Kerajinan

No	STATUS	JUMLAH (ORANG)
1.	Pemilik Usaha Kerajinan	15
2.	Pemilik Usaha Industri Rumah Tangga	5
3.	Buruh/Pekerja Industri Kecil/Ker.Rumah Tangga	3
	J u m l a h	

(sumber dari rancangan pembangunan jangka menengah Desa Mattirotasi tahun 2019)

F. Sarana dan Prasaran Desa Mattirotasi

Sarana dan prasarana sebagai penunjang kehidupan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah setempat sebagai upaya untuk memudahkan aktivitas di daerah tersebut.

Tabel 8. Sarana dan prasarana di Desa Mattirotasi

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 unit
2	Gereja	-
3	Mesjid/mushollah	8 unit
4	Sekolah	3 unit
5	Posyandu	1 unit
6	Puskesmas	-
7	Lapangan olahraga	2 unit

(sumber dari rancangan pembangunan jangka menengah Desa Mattirotasi tahun 2019)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik informan

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, dan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Informan dipilih dengan kriteria tertentu. Masing-masing, 2 orang anggota kelompok Sipatuo II, 1 aparatur desa, 1 pengelola BUMDes, 1 masyarakat biasa. Berikut data lengkap ke 5 informan dalam penelitian ini

Table 4.11 Data Informan Penelitian

No	Nama (inisial)	Umur	L/ P	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Sumiati (S)	39 tahun	P	SMP	Masyarakat Desa
2	Zaimuddin (ZM)	60 tahun	L	SMA	Kepala Desa
3	Jumarlin (J)	48 tahun	L	SMA	Ketua Kelompok HKm
4	Masna (M)	36 tahun	P	S1	Pengelola BumDes
5	Muh. Amin (MA)	42 tahun	L	S1	Ketua Kelompok Usaha HKm

Berikut penjelasan masing-masing informan:

1. Sumiati adalah seorang masyarakat desa Mattirotasi yang merupakan salah satu informan mengenai pemberdayaan melalui HKm.
2. Zaimuddin merupakan kepala desa yang cukup mengetahui tentang transisi warga mattirotasi sebelum masuk program HKm
3. Jumarlin merupakan Ketua KTH Sipatuo II yang dapat memberikan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program HKm

4. Masna merupakan pengurus BumDes Mattirotasi yang sedikit mengetahui tentang program HKM
5. Muh. Amin merupakan ketua KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) Kacang mente sekaligus anggota program HKm yang dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program HKm

B. Hasil Penelitian

No.	Nama	Tanggapan	Makna
1	Sumiati	anggota kelompok memiliki berbagai macam latar belakang antara lain supir truk, buruh pabrik, eks karyawan dan petani tapi lambat laun semenjak bagus mi penanaman mete , mereka mulai tinggalkan pekerjaan awalnya dan fokus di mete	Dari sini kita bisa melihat bahwa kelompok ini terbentuk dari berbagai latar belakang pekerjaan sebelum masuk kedalam anggota kelompok tani. Perubahan status sosial masyarakat yang awalnya bekerja sebagai buruh , supir truk dan hanya ibu rumah tangga biasapun akhirnya bisa mengelolah Hutan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu.
2	ZM	Saya menjadi aparat desa itu semenjak 2003 dan sebelum itupun program HKm ini sudah berjalan, anggota memiliki berbagai kegiatan seperti penanaman mente dan pembibitan dan berkembang lagi menjadi ternak sapi dan kambing. secara tidak langsung program HKm turut membantu memasarkan dan mengembangkan BumDes, BumDes Mattirotasi membuka wisata kincir angin sekaligus membantu penjualan mete	Perkembangan proses pemberdayaanpun bisa dilihat atau dirasakan langsung oleh aparat desa setempat dimana masyarakat yang tergabung dalam program HKm ini turut membantu dan memasarkan produk dari BumDes.

3	J	<p>Ada pilot proyek yang dinamakan OECF dari Jepang untuk melakukan modifikasi mindset masyarakat disini (desa Mattirotasi) dengan memanfaatkan Hutan Produksi Terbatas , pada saat itu sosialisasi dan pengenalan program selama 2 tahun lalu pada tahun 2000 ada lagi pemeliharaan dari BPDAS Jeneberang Waranai selama 3 tahun yaitu tahun 2001 – 2003 . Setelah itu didampingi oleh LSM sampai tahun 2010. Ada evaluasi setelah pada tahun 2012 terbit ijin dari Kementrian Kehutanan</p>	<p>OECF adalah singkatan dari Overseas Economic Cooperation Fund . Program ini yang menjadi dasar pembentukannya Perhutanan Sosial tahun 2016 , melalui program ini masyarakat diajak untuk bersama mengelola hutan dengan cara memanfaatkan hasil hutan non kayunya , masyarakat digiring untuk mengelola mete dan tanaman semusim tanpa menebang atau membuka lahan baru. Dengan cara inilah pemerintah mempertahankan hutan dan masyarakat tetap bisa menikmati hasil hutan tanpa harus merusak lingkungan.</p>
4	MN	<ul style="list-style-type: none"> - iyye karena saya sendiri pun begitu bu kalo ada keuntungan dari penjualan, ada beli sapi untuk kelompok ada juga untuk saya sendiri tapi di pelihara di kebun milik kelompok supaya ada awasi. Ada juga punya salahsatu anggota itu sekitar 20 sapi 	<ul style="list-style-type: none"> -
5	MA	<ul style="list-style-type: none"> - Program EOCF pada tahun 99 ini merupakan solusi atas terjadi krisis moneter , jadi dengan program ini diharapkan urbanisasi dari desa kekota pun berkurang. - Awalnya dari OECF ini melakukan sosialisasi dan pelatihan menanam selama 2 tahun dalam pendampingan dan pengawasan dari BPDAS Jeneberang Waranai. Warga dikumpul di balai desa dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seperti yang dikatakan oleh narasumber dari hasil sosialisasi yang didapatkan bahwa program ini bertujuan agar masyarakat disdesa mengembangkan potensi alam yang mereka miliki agar tidak perlu mencari nafkah jauh ke kota .

		<p>dijelaskan tujuan dari program OECF ini setelahnya di data warga yang mengelolah di hutan atau memiliki kebun di hutan barulah dibentuk sebuah kelompok di Kabupaten Sidrap sendiri terdiri dari 2 kelompok tani yaitu KTH Sipatuo I dan KTH Sipatuo II namun yang berkembang dengan program pemberdayaan masyarakat hutan ini adalah KTH Sipatuo II dengan hasil kelolah Jambu Kacang mente dan Silvofastur</p> <ul style="list-style-type: none"> - didalam kelompok tani sipatuo terbagi 3 blok , blok yang pertama Jambu Mete , kedua kayu jati dan ketiga gabungan dari jambu mete dan jati selain itu didalam (hutan) juga kami melakukan kegiatan silvofastur dengan membuat kandang sapi dan memelihara sapi. kami tidak bisa bergantung terus – terus kepada bantuan pemerintah karena menurut kami modal awal kami adalah ijin pengolahan hasil hutan seterusnya kami berusaha untuk memutar modal yang ada - bisa dibilang taraf ekonomi kami berubah mba yang dulunya kami harus bolak-balik sidrap – Makassar untuk cari uang sekarang kami hanya tinggal ke kebun atau jual kacang mente baik secara gelomdongan maupun kemasan , Alhamdulillah bisami mencukupi kebutuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilihat masyarakat dalam hal ini langsung dikumpulkan dan dibentuk kepengurusan dan susunan kelompoknya namun tidak dilepas begitu saja dalam hal ini pihak BPDAS dan LSM mendampingi masyarakat selama proses penanaman dan memberikan pelatihan.
--	--	--	--

		<p>Bahkan mba sebelum ada HKm dulu kita ke kebun jalan kaki sekarang naik motor atau mobil dan itu semua hasil dari situ semua.</p> <p>- kami tidak bisa bergantung terus – terus kepada bantuan pemerintah karena menurut kami modal awal kami adalah ijin pengolahan hasil hutan seterusnya kami berusaha untuk memutar modal yang ada</p>	
--	--	--	--

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pelibatan Masyarakat dalam Program HKm

a. Sosialisasi Program Hutan Kemasyarakatan

Mekanisme Pelibatan masyarakat ini penting diketahui terlebih lagi program HKm di desa Mattirotasi terbilang cukup lama proses dan sudah melalui 2 generasi dari anggotanya. Tentu saja ada berbagai tahapan sebelum masyarakat dibentuk menjadi sebuah kelompok terlebih lagi awalnya masyarakat hanya menjalankan aktifitas sebagai petani , ibu rumah tangga, sopir angkutan antar kabupaten , dan buruh pabrik namun pada tahun 1999. Bapak J mengungkapkan dalam wawancara kami:

“Ada pilot proyek yang dinamakan OECF dari Jepang untuk melakukan modifikasi mindset masyarakat disini (desa Mattirotasi) dengan memanfaatkan Hutan Produksi Terbatas , pada saat itu sosialisasi dan pengenalan program selama 2 tahun lalu pada tahun 2000 ada lagi pemeliharaan dari BPDAS Jeneberang Waranai selama 3 tahun yaitu tahun 2001 – 2003 . Setelah itu didampingi oleh LSM sampai tahun 2010. Ada

evaluasi setelah pada tahun 2012 terbit ijin dari Kementerian Kehutanan” (wawancara 28 desember 2019)

Lalu ditambahkan lagi oleh Bapak M.A

“Awalnya dari OECF ini melakukan sosialisasi dan pelatihan menanam selama 2 tahun dalam pendampingan dan pengawasan dari BPDAS Jeneberang Waranai. Program EOCF pada tahun 99 ini merupakan solusi atas terjadi krisis moneter , jadi dengan program ini diharapkan urbanisasi dari desa ke kota pun berkurang. Warga dikumpul di balai desa dan dijelaskan tujuan dari program OECF ini setelahnya di data warga yang mengelolah di hutan atau memiliki kebun di hutan barulah dibentuk sebuah kelompok di Kabupaten Sidrap sendiri terdiri dari 2 kelompok tani yaitu KTH Sipatuo I dan KTH Sipatuo II namun yang berkembang dengan program pemberdayaan masyarakat hutan ini adalah KTH Sipatuo II dengan hasil kelolah Jambu Kacang mente dan Silvofastur” (wawancara 29 desember 2019).

OECF adalah singkatan dari Overseas Economic Cooperation Fund, melalui program ini masyarakat diajak untuk bersama mengelolah hutan dengan cara memanfaatkan hasil hutan non kayunya , masyarakat digiring untuk mengelolah buah-buahan hasil hutan dan tanaman semusim tanpa menebang atau membuka lahan baru. Dengan cara inilah pemerintah mempertahankan hutan dan masyarakat tetap bisa menikmati hasil hutan tanpa harus merusak lingkungan. Pembentukan kelompok ini dilakukan melalui beberapa tahap, yang antara lain :

1. Pertama sosialisasi tentang program, tujuan program
2. Pengumpulan data dan KTP serta anggota yang ingin bergabung atau yang sudah mengelolah didalam hutan produksi terbatas tersebut.

3. Selanjutnya diberikan bimbingan dan pelatihan penanaman kehutanan dan Pohon Jambu Mete yang berlangsung selama 2 (dua) tahun.

Jadi program ini sudah ada sejak zaman orde baru namun saat itu masih dikelola secara langsung oleh Jepang barulah 2012 pergantian masa transisi pemerintahan pun turut mempengaruhi berbagai kebijakan yang ada dan pada akhirnya tahun 2016 program HKM ini masuk ke dalam program baru yang disebut perhutanan sosial. Disini kita bisa melihat upaya masyarakat dengan mulai memperdayakan satu sama lain untuk keberlangsungan dari program dan perekonomian masyarakat yang makin meningkat.

b. Pembentukan Kelompok

Setelah pengumpulan KTP maka dibuatlah berita acara dan terbitnya ijin pengelolaan HKM, seperti yang dituturkan oleh narasumber di Kabupaten Sidrap ada 2 (dua) kelompok yang tersusun yaitu KTH Sipatuo I dan KTH Sipatuo II dimana KTH Sipatuo II yang ada di Desa Mattirotasi yang memfokuskan pemberdayaannya di pengolahan jambu mete dan silvofastur (praktik mengintegrasikan pohon, mencari makan, dan merumput hewan peliharaan dengan cara yang saling menguntungkan). Pemberdayaan jambu mete dan silvofastur ini lebih dikenal masyarakat dengan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial). Diakui oleh Ketua KUPS Jambu Mete bahwa perjalanan pemberdayaan ini sempat terkendala dengan iklim

di Kabupaten Sidrap yang berangin dan hutan yang mulai tandus ,
berikut penuturan narasumber :

“awal-awal penanaman itu susah sekali bu, sempat gagal terus bulan-bulan pertama karena hutan disini sudah mulai tandus terus disini berangin dan panas bahkan bibit ada yang terbakar dan mati, belum lagi jalan menuju desa sama lokasi penanaman itu jele’ sekali, mulai mi juga orang-orang menyerah karena sikon dan harus menyambung hidup sehari-hari” (wawancara 26 Desember 2019)

Disini bisa kita lihat bahwa program ini berjalan tidak semudah yang disosialisasikan ke masyarakat proses lama dalam penanaman membuat beberapa anggota menyerah dan kembali ke pekerjaan awal mereka. Awalnya masyarakat hidup dengan berladang , menjadi buruh pabrik , supir truk serta karyawan diperusahaan . Pola hidup masyarakat saat itupun masih terbilang sederhana dan acuh tak acuh serta tingkat pendidikan masih terbilang rendah , masyarakat belum mampu untuk menempuh pendidikan ke SMA atau ke perguruan tinggi. Ibu Sumiati menuturkan

“anggota kelompok memiliki berbagai macam latar belakang antara lain supir truk, buruh pabrik, eks karyawan dan petani tapi lambat laun semenjak bagus mi penanaman mete , mereka mulai tinggalkan pekerjaan awalnya ”(wawancara 28 desember 2019).

Warga dikumpul di balai desa dan di data satu per satu siapa saja yang memiliki kebun atau bertani disekitar hutan untuk dikumpulkan KTP (kartu tanda penduduk) untuk di bentuk menjadi kelompok tani hutan desa mattirotasi. Awalnya masyarakat diperkenalkan dengan program yang bernama OECF atau Overseas

Economic Cooperation Fund yang berasal dari Jepang melakukan sosialisasi program selama 2 tahun mulai dari tahun 1999-2000 lalu dilanjutkan oleh BPDAS Jeneberang Waranai dengan pelatihan penanaman karena sempat gagal panen akibat terbakarnya beberapa bibit tanaman saat diuji coba. Perlahan warga pun menjadi mahir dalam bercocok tanam dan beternak dengan cara yang ramah lingkungan dan terbuka wawasan mereka untuk berbisnis dengan hasil hutan yang mereka produksi sendiri di Hutan Produksi Terbatas yang menjadi wilayah kelolah masyarakat.

Banyak oknum baik aparat desa maupun masyarakat terlibat didalam proses ini sekalipun mereka jadi terpisah kelompok dan non kelompok tapi sedapat mungkin program HKm ini menyikut sertakan masyarakat secara umum selain itu , hasil yang didapat kelompok tiap tahun di sisikan untuk pembangunan masjid atau prasarana lain yang dianggap dapat menopang kesejahteraan bersama, gotong- royong pun masih menjadi kunci utama disini sebisa mungkin mereka saling membantu terlepas dari diupah atau tidak.

Awal mula HKm ini sempat diam karena pengurus kala itu sudah memasuki usia lanjut sehingga terjadi beberapa perombakan pengurus agar kelompok tetap hidup, setelah beberapa pengurus dirombak terjadinya evolusi baru didalam kelompok dengan orang-orang muda yang menjadi penerus mulai bangkitlah semangat kelompok untuk membuat perubahan seperti yang saya katakana di

awal kepengurusan ini sudah memasuki generasi ke 2 bahkan anak-anak remaja generasi 3 pun sudah mulai mendalami kegiatan program ini.

2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program HKM

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri . Pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Desa Mattirotasi melalui program HKM ini sendiri seperti disinggung sebelumnya telah dibentuk sub kelompok kecil yang disebut Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang dimana di badan usaha milik Kelompok Tani Sipatuo II dan melakukan berbagai jenis kegiatan dibawah naungan. Penuturan M.A tentang kelompok usaha ini :

*“Dalam kelompok tani sipatuo terbagi 3 blok , blok yang pertama Jambu Kacang mente , kedua kayu jati dan ketiga gabungan dari jambu kacang mente dan jati selain itu didalam (hutan) juga kami melakukan kegiatan silvofastur dengan membuat kandang sapi dan memelihara sapi”
(wawancara tanggal 25 desember 2019.*

Tak lepas dari itu perkembangan pola pikir masyarakat juga diiringi dari berbagai pelatihan yang telah masyarakat ikuti guna merangsang perkembangan produk berbagai pelatihan tersebut antara lain : pengolahan kripik dan pelatihan jaminan halal, pelatihan yang diikuti oleh beberapa anggota kelompok kemudian di rapatkan kembali dengan kelompok yang ada didesa. Disini masyarakat sudah

mulai mengembangkan produk mereka yang awalnya mereka hanya menjual mete secara gelondongan ke pabrik atau ke pengepul, mereka pun berusaha menciptakan berbagai inovasi untuk produk mereka. Berkat berbagai inovasi inipun kelompok banyak yang memanfaatkan masyarakat sekitar desa untuk menjadi karyawan mereka. Seperti yang dijelaskan pemberdayaan masyarakat adalah suatu “proses” dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan. Inovasi ini berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar, kelompok tak hanya menjual mete secara gelondongan namun sudah ada dalam bentuk kemasan siap makan antara lain mete sangrai, kurma mete dan mete crispy dan telah dipasarkan ke berbagai lokasi pusat belanja dan ole-ole khas Makassar dengan jumlah produk yang bertambah dan membutuhkan orang-orang tertentu dalam hal menyangrai, meracik bumbu dsb maka disini kelompok Sipatuo II turut memberdayakan sebagian kelompok masyarakat antara lain ibu-ibu rumah tangga yang suaminya bekerja diladang atau. Ibu-ibu ini terhitung sebagai buruh harian dengan gaji perhari sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) penuturan ini disampaikan langsung oleh bapak M.A

“ibu-ibu digaji perhari sebesar Rp. 60.000 karena tidak masuk tiap hari, disesuaikan dengan hari mereka datang”(wawancara 26 desember 2019).

Selanjutnya informan MA, kembali menjelaskan atau mempertegas dari informasi yang diberikan sebelumnya, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

*“kami biasa mengupah tetangga atau istri dari anggota untuk membantu pengolahan di KUPS-KUPS yang ada karena kalo bukan kita yang saling mensejahterkan siapa lagi?”
(wawancara 26 desember 2019) tambahnya.*

Bukan hanya ibu-ibu yang menjadi buruh harian ada pula pemuda-pemudi yang turut menjadi buruh harian dengan tugas berbeda-beda antara lain: Menjadi buruh petik, bekerja dibagian pengolahan produk mete, Penjaga ternak atau mengembala ternak dan bagian pemasaran produk. Dibagian pemasaran produk inilah aparat desa merasa terbantu dengan adanya kelompok masyarakat sipatuo II ini karena KUPS Mete telah berkolaborasi dengan BUMDes Mattirotasi menurut penuturan kepala desa Mattirotasi :

*“secara tidak langsung program HKM turut membantu memasarkan dan mengembangkan BumDes, BumDes Mattirotasi membuka wisata kincir angin sekaligus membantu penjualan kacang mente ,saya menjadi aparat desa itu semenjak 2003 dan sebelum itupun program HKM ini sudah berjalan, anggota memiliki berbagai kegiatan seperti penanaman kayu kehutanan pohon jambu mente dan pembibitan. Balai desa adalah titik kumpul pertama sosialisasi ini dimulai, aparat desa pun turut mendapat keuntungan dari distribusi yang di berikan kelompok”
(wawancara 28 desember 2019).*

Ini sesuai dengan definisi community development yang menekankan bahwa konsep pembangunan masyarakat, merupakan suatu

proses usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah atau masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa serta memberdayakan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional (Luz. A. Einsiedel 1968:7). Disini bisa dilihat program nasional yang berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyesuaikan program yang berdampak dengan proses perekonomian masyarakat yang meningkat. Perkembangan produksi mete memiliki imbas tersendiri untuk KUPS kedua yaitu KUPS Silvopatur, KUPS Silvopasturnya yang awalnya hanya memiliki beberapa ekor kini 1 orang dalam kelompok bisa memiliki 5-20 ekor ternak sesuai penuturan Ibu Sumiarti :

“Dulu itu kita itu cuma punya sekitar 5 ekor ternak tapi semenjak adami penghasilan dari mete masing-masing bisami beli sendiri karena masing-masing orang punya lahan yang bisa mereka kelolah” (wawancara 26 desember 2019).

Pernyataan ibu sumiarti ini diperkuat dengan pernyataan dari MN :

“Iyye karena saya sendiri pun begitu bu kalo ada keuntungan dari penjualan, ada beli sapi untuk kelompok ada juga untuk saya sendiri tapi di pelihara di kebun milik kelompok supaya ada awasi. Ada juga punya salahsatu anggota itu sekitar 20 sapi” (wawancara 26 desember 2019).

Ada tujuan tertentu saat ada keuntungan dari hasil penjualan mete di belikan hewan ternak menurut penuturan bapak M.A :

“kami tidak bisa bergantung terus – terus kepada bantuan pemerintah karena menurut kami modal awal kami adalah ijin pengolahan hasil hutan seterusnya kami berusaha untuk memutar modal yang ada nah dengan adanya pembelian ternak dari keuntungan penjualan kami jadikan itu sebagai modal kalo nanti tiba-tiba butuh modal penanaman bibit yang mati” (wawancara 27 desember 2019).

yang diperkuat dengan pernyataan bapak J :

“peternakan sapi yang dikelola dilokasi HKm adalah salah satu mata pencarian selain kacang mente untuk pemberdayaan disekitar dengan menjadi gembala ternak dan diupah” (wawancara 27 desember 2019).

Pola pikir masyarakat perlahan berubah dengan berjalannya waktu bukan hanya memikirkan tentang keuntungan sesaat tapi juga berpikir kedepan untuk keberlangsungan kelompok dengan “menabung” , bentuk tabungannya pun dengan memanfaatkan KUPS yang ada sehingga pengolahannya jelas dan terarah.

Setelah dirasa cukup berhasil mensejahterakan anggota kelompok maka pengurus pun beralih ke masyarakat umum, dengan produksi yang semakin meningkat maka kebutuhan akan tenaga kerja pun meningkat sehingga pengurus kelompok memutuskan untuk memanfaatkan ibu rumah tangga atau pemuda desa. Kelompok pun mengupah masyarakat sesuai dengan tingkatan kerja yang mereka lakukan perhari , masyarakat disini akan di pekerjakan ketika mendekati hari panen, dan ketika pesanan kacang mente kemasan meningkat bahkan pemasarannya pun dipakai pemuda desa untuk mempromosikan dan di pekerjaan untuk pekerjaan administrasi seperti membuat persuratan atau proposal bantuan.

Tidak hanya itu manfaat lain yang dirasakan masyarakat adalah terbuka berbagai bantuan dari kementerian KLHK atau kementerian lain dalam hal bantuan alat ekonomi produktif seperti alat penggoreng, freezer, alat pengemasan serta link bisnis yang masuk. Bahkan produk-produk ini sudah bisa kita temukan di salah satu mini market yang ada di Barru walaupun demikian mereka masih memasarkannya sampai di Makassar serta dibantu pemasarannya oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi atau dari kantor kehutanan sendiri sebagai ajang promosi. Selain itu mereka mempekerjakan masyarakat sebagai gembala ternak sapi yang ada dikebun penghasilan dari ternak itulah yang dikelola untuk pengupahan atau membeli bibit baru. Meski awalnya mereka ragu untuk meneruskan karena pada tahun 2005 sempat terjadi gagal panen karena kondisi Kabupaten Sidrap yang panas dan berangin membuat bibit yang ada terbakar namun tahun ini pula mereka mulai bangkit dan mencoba peruntungannya lagi.

3. Faktor yang Mempengaruhi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Ada berbagai macam hal yang bisa mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang ingin mengubah nasib dan dalam hal ini program yang diterapkan oleh EOCF dan dilanjutkan dengan program perhutanan sosial dalam hal ini Hutan Kemasyarakatan memungkinkan masyarakat untuk menjadi pengolah dalam kelompok dan mengubah mindset nya sendiri.

Ada berbagai macam hal yang bisa mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang ingin mengubah nasib dan dalam hal ini program yang diterapkan oleh EOCF dan dilanjutkan dengan program perhutanan social dalam hal ini Hutan Kemasyarakatan memungkinkan masyarakat untuk menjadi pengolah dalam kelompok dan mengubah mindset nya sendiri. Bagi anggota kelompok Sipatuo II mereka ingin memiliki taraf kehidupan yang lebih baik lagi daripada saat mereka masih menjadi buruh lepas atau pekerjaan mereka yang sebelumnya dan tentu saja yang bias dirasakan oleh anak cucu nya kelak. Dengan program perhutanan social yang memiliki masa ijin 35 tahun, warga berpikir bagaimana cara mereka mengembangkan potensi yang ada pada desa mereka menjadi sebuah keuntungan bersama.

Menurut A.M masyarakat awalnya sangat bergantung dengan penghasilan yang mereka dapat diluar desa sehingga pengurus HKm yang lama kebanyakan adalah orang tua mereka sendiri sehingga awalnya HKmini sempat berhenti di tengah jalan sebelum akhirnya di buatlah peraturan jika menurut ketua KTH aturannya antara lain

“jika dalam kurun waktu setahun hanya dibiarkan maka akan dialihkan kepada orang yang mau mengelolah agara lahan tersebut tidak menjadi lahan mati” (wawancara 30 desember 2019).

Menurut A.M masyarakat awalnya sangat bergantung dengan penghasilan yang mereka dapat diluar desa sehingga pengurus HKm

yang lama kebanyakan adalah orang tua mereka sendiri sehingga awalnya HK mini sempat berhenti di tengah jalan sebelum akhirnya di buatlah peraturan jika menurut ketua KTH aturannya antara lain siapa yang tidak mengelolah lahannya selama lebih dari setahun maka lahannya akan dikelola oleh orang lain dalam kelompok dengan ditanam kembali sesuai tanaman yang telah disepakati. Dengan adanya pergantian anggota tersebut makanya sejalanlah anggota satu dengan yang lain untuk saling mensejahterakan.

Dengan adanya pergantian anggota tersebut makanya sejalanlah anggota satu dengan yang lain untuk saling mensejahterakan, karena pola pikir generasi kedua lebih maju dan lebih terbuka untuk bukan hanya berladang namun ikut andil dalam memulai bisnis. Dalam hal ini faktor-faktor dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal :

1. Faktor Internal

Ada beberapa faktor yang mendukung hal ini :

- Masyarakat khususnya yang tergabung dalam kelompok tani memahami dengan mengolah hutan secara berkala dapat memberikan hasil yang memuaskan untuk mereka
- Awalnya masyarakat berat untuk memulai apalagi jarak kebun dalam hutan cukup jauh dari pemukiman
- Intere kelompok yang terorganisir akhirnya membuat perubahan

- Perubahan jaman dan social ekonomi makin me'funjak seiring waktu membuat mereka memutar otak untuk membiayai.

2. Faktor Eksternal

Pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh Kementrian KLHK selaku penerbit ijin usaha setiap 5 tahun sekali membuat warga terpacuh untuk mengolah lebih giat karena jika ijin dianggap tidak membawa perubahan maka ijin tersebut akan dicabut sebagaimana informasi Bapak ZM, sebagai berikut:

“Sesuai aturan di awal mba , akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali oleh kementrian dan kami tidak mau kalo terlihat ijin yang diberikan terkesan sia-sia” tutur Bapak ZM.

Selain itu faktor eksternal dalm hal ini juga adalah melihat hasil yang didapatkan anggota lain, maka Bapak AM yang juga merupakan anggota masyarakat, mengatakan sebagai berikut:

“Bisa dibilang taraf ekonomi kami berubah mba yang dulunya kami harus bolak-balik sidrap – Makassar untuk cari uang sekarang kami hanya tinggal ke kebun atau jual kacang mente baik secara gelomdongan maupun kemasan , Alhamdulillah bisami mencukupi kebutuhan. Bahkan mba sebelum ada HKm dulu kita ke kebun jalan kaki sekarang naik motor atau mobil dan itu semua hasil dari situ semua”(wawancara,30 desember 2019).

Dukungan baik dari segi ekonomi maupun promosi terus berdatangan dari berbagai dinas pemerintahan. Hal ini kemudia diperjelas oleh pernyataan Bapak AM sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Dulu rumah ku , biasa-biasa tapi semenjak jalan ini program bisami di renovasi” (wawancara, 30 desember 2019)

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian lapangan dan pembahasan dari informasi data yang ditemukan dilapangan, maka hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, sebagaimana berikut:

1. Mekanisme melibatkan masyarakat penerima manfaat dalam program HKM ini yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan pembentukan kelompok dalam pengelolaannya yang dimulai dengan masuk ke dalam program baru yang nyatanya belum berjalan dengan yang diharapkan. Apa yang diutarakan selama sosialisasi nyatanya tidak sesuai saat setelah pembentukan tim dilakukan. Hal ini dikarenakan masyarakat masih proses lama dalam penanaman disamping itu juga dipengaruhi kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah.
2. Pemberdayaan masyarakat yang diterapkan melalui program HKM pada umumnya cukuplah baik. Hal ini dikarenakan dijaganya ritme pelatihan masyarakat. Semua pada umumnya dimulai dari tim kelompok dan diteruskan kepada masyarakat yang khususnya berfokus pada pemuda.
3. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program HKM yaitu internal dan eksternal. Pada

faktor internal berkaitan dengan kondisi masyarakat hingga keadaan lingkungan. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu keadaan yang sifatnya diluar internal dari keadaan kondisi diluar kehendak masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas , maka peneliti memberikan saran sebagai solusi dalam mengoptimalkan proses pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut :

1. Perlu tindakan yang konsisten antara apa yang disosialisasikan terkait pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan implementasinya. Maka dari itu, komunikasi antar pihak diperlukan, bahkan jika bisa membut tim yang bisa turun langsung membantu pemberdayan masyarakat yang diharapkan.
2. Menjaga ritme pemberdayaan yang dimulai dari tim kelompok ke masyarakat umum. Hal lain yang juga harus dilakukan adalah adanya bentuk tindakan pengontrolan ke masyarakat-masyarakat yang diberdayakan. Sehingga perkembangan dari tindakan yang dilakukan bisa terjaga dan bersinergitas.
3. Pihak yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program HKM ini perlu membentuk sistem ataupun susunan strategi yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi masalah-masalah dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang supriyanto. 2019. *Catatan Dari Tepi Hutan*.

Eva wollenberg, 2005. *Pembelajaran Social Dalam Pengelolaan Hutan Komunitas*

<https://mahmudisiwi.net/definisi-community-development> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019).

Mukhar, Soemarno, Kliwon Hidayat. 2010. *Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Local* Jakarta: Values Education Journal.

Mulyana, Agus, dkk. *Menghadapi Perubahan Social Untuk Pengelolan Sumber Daya Alam*.

Nanang martono. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: pt Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no.83 th 2016, *tentang perhutanan social*.

Prof.Dr.Ir.Agustinus. 2018. *Kajian Dampak Social Perhutanan: Maluku-Papua*.

Riski sanjaya. 2016, *evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) pada gabungan kelompok tani rukun lestari sejahtera di desa sindang pagar kecamatan sumber jaya kabupaten lampung barat,*

Sanuddin, San, dkk. 2016. *Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung*, Jurnal Manusia Dan Lingkungan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*
Bandung : Alfabeta

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.
Surabaya: PT. RefikaAditama.

Sztompka piotr. 2017. *Sosiologi Perubahan Sosial* (edisi pertama). Jakarta:
Prenada.

Syarizal. 2015. *Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Dengan Pola Agroforestry Di Desa Amal Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala*.

www.materibelajar.id. *Definisi Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli*, [https://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi - pemberdayaan .html](https://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pemberdayaan.html). (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019).



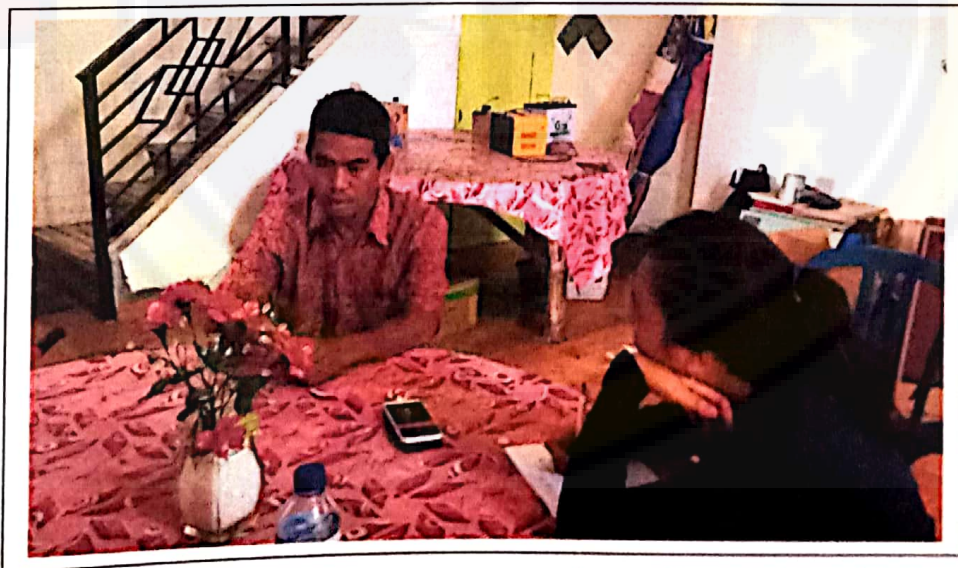
LAMPIRAN



Dokumentasi 1.1 Foto wawancara dengan Ibu N (anggota kelompok Tani HKm)



Dokumentasi 1.2 Foto proses wawancara dengan Wawancara dengan Kepala Desa Mattirotasi



Dokumentasi 1.3: Foto proses wawancara dengan Ketua Kelompok HKm



Dokumentasi 1.4: Foto proses wawancara dengan Anggota Kelompok Tani



Dokumentasi 1.5: Foto proses wawancara dengan Anggota Kelompok Tani



Dokumentasi 1.7 : Foto proses pengolahan mete Anggota Kelompok Tani



Dokumentasi 1.8 : Foto proses pengolahan mete Anggota Kelompok Tani



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.412/FSP/UNIBOS/XII/2019
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,
Kepala Desa Mattirotasi
Di-

Kabupaten Sidrap

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Louise Angeline Pakasi
NIM : 45 16 022 002
Judul penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Hutan Melalui Program Hutan Kemasyarakatan.
Tempat : Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap
Waktu : Desember 2019 – Januari 2020

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 17 Desember 2019

Dekan Fisip Unibos,


Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
NIDN : 09271107602

Tembusan :

1. Arsip



UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.412/FSP/UNIBOS/XII/2019
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,
Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan Sipatuo Dua
Di-
Kabupaten Sidrap

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Louise Angeline Pakasi
NIM : 45 16 022 002
Judul penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Hutan Melalui Program Hutan Kemasyarakatan.
Tempat : Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap
Waktu : Desember 2019 – Januari 2020

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 17 Desember 2019

Dekan Fisip Unibos,



Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
NIDN : 09271107602

Tembusan :
1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
DESA MATTIROTASI

Jalan Pabbaresseng No. 21 Kode Pos 91661

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 141/0001911/DMT/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.ZAINUDDIN MAKKARENNU
Jabatan : Kepala Desa Mattirotasi

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Louise Angeline Pakasi
Status : Mahasiswa Universitas Bosowa

Telah melakukan penelitian di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, terhitung sejak 25-29 desember 2019 .

Demikian Surat Keterangan Penelitian Ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan dengan semestinya.

Mattirotasi, 28 Desember 2019

Kepala Desa Mattirotasi



Drs.ZAINUDDIN MAKKARENNU